

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian *Auditing* dan Standar *Auditing***

##### **2.1.1 Pengertian *Auditing***

*Auditing* merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Lingkup audit operasi berkenaan dengan setiap pengendalian yang mempengaruhi efisiensi atau efektivitas, sedangkan lingkup dari evaluasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan terbatas pada efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan dan dampaknya terhadap penyajian yang wajar dari laporan keuangan.

Hal diatas berhubungan dengan pengertian auditing yang di kemukakan oleh beberapa ahli seperti yang dikemukakan oleh Jusup (2010:11) *auditing* adalah:

Suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Defenisi *auditing* menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:100.1) dijelaskan bahwa *audting* adalah:

suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Sedangkan Menurut Mulyadi (2013:9) *auditing* adalah:

Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *auditing* adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen independen untuk mendapatkan serta mengevaluasi bukti – bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi atau perlakuan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi–asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

## 2.2 Jenis-Jenis *Audit* dan Tujuan *Audit*

### 2.2.1 Jenis-Jenis *Audit*

Terdapat beberapa jenis *audit* yang dilakukan *auditor* dalam melaksanakan pemeriksaan. Jenis-jenis tersebut berdasarkan pada jenis pemeriksaan ataupun luasnya pemeriksaan. Menurut Sukrisno (2012:10), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis *audit* dapat dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)  
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan *Audit* Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)  
Suatu bentuk pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *audit*) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya *auditor* tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur *audit* yang dilakukan juga terbatas.

Sedangkan jenis Auditing menurut Elder, Beasley, Arens, Jusuf (2012:6) adalah sebagai berikut :

1. Audit Laporan Keuangan  
Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh data mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

## 2. Audit Kepatuhan

Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa buktibukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan peraturan tertentu.

## 3. Audit operasional

Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

### 2.2.2 Tujuan Audit

Tujuan *audit* atas laporan keuangan oleh *auditor* independen menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:110.1) adalah:

Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002:67) yaitu:

Tujuan umum *audit* atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan.

Untuk menentukan tujuan *audit*, *auditor* harus mengevaluasi masing-masing dari lima laporan yang berkaitan dengan saldo akun tertentu atau kelompok transaksi yang sedang diperiksa. Karena hubungan antar tujuan *audit* dan asersi sangat erat, maka *auditor* seringkali menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Pengklasifikasian asersi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:326.2) yaitu :

#### 1. Keberadaan atau Keterjadian (*Existence or Accurrence*)

Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.

#### 2. Kelengkapan (*Completeness*)

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya.

3. Hak dan Kewajiban (*Right and Obligation*)  
Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
4. Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and disclosure*)  
Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya.

## **2.3 Pengertian, Tujuan Struktur Pengendalian Intern**

### **2.3.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern**

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena merupakan alat untuk mengendalikan aktivitas entitas guna membantu menjamin aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Standar Profesional Akuntansi Publik (2011:319:2) pengendalian intern adalah :

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang tiga golongan yaitu: keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:180), dari pengertian pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep berikut ini:

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur pengendalian intern merupakan suatu rangkaian yang bersifat pervasive dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lain.
3. Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris, entitas, bukan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan pedoman yang dibuat suatu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Prosedur merupakan langkah-langkah tertentu yang harus diamati

dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan organisasi adalah akhir dari suatu kegiatan atau hasil yang akan dicapai perusahaan, hasil yang dimaksud adalah laba yang telah diperoleh.

### **2.3.2 Tujuan Struktur Pengendalian Intern**

Pengendalian intern dibuat untuk menjamin tercapainya tujuan yang direncanakan perusahaan. Pengendalian intern memberikan pengawasan dalam semua kegiatan perusahaan. Tanggung jawab *auditor* atas pengendalian intern adalah harus memahami hubungan antara pengevaluasian pengendalian intern dengan tujuan *audit*.

Menurut Tuanakotta (2013:127) tujuan struktur pengendalian intern secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

1. Strategis, sasaran-sasaran utama (high level goals) yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
3. Operasi (pengendalian operasional atau operational controls).
4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

### **2.3.3 Unsur-Unsur Struktur Pengendalian Intern**

ISA Seksi 319 Pertimbangan atas Struktur Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan paragraf 07 menyebutkan lima unsur pengendalian intern, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain :

  - a. Integritas dan nilai etika
 

Efektifitas struktur pengendalian intern bersumber dari dalam diri seseorang yang mendesain dan melaksanakannya. Struktur pengendalian intern yang memadai desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan pengendalian inten.
  - b. Komitmen terhadap kompetensi
 

Untuk mencapai tujuan entitas, personel disetiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap

kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dari paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak ditangani manajemen (direksi).

d. Filosofi dan gaya operasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (*basic beliefs*) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Filosofi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: (1) apa yang menjadi alasan perusahaan dalam bisnis?, (2) bagaimana perusahaan dalam melaksanakan bisnis?, (3) apa yang dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan?

e. Struktur Organisasi

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Orang bergabung dalam organisasi dengan maksud utama untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapainya dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Struktur organisasi memberikan rangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas.

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi.

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap struktur pengendalian intern. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur struktur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah indentifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi. Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perusahaan keadaan, seperti :

- a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal
  - b. Perubahan standar akuntansi
  - c. Hukum dan peraturan baru
  - d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi system dan teknologi baru yang digunakan untuk pengelolaan informasi
  - e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perusahaan fungsi pengelolaan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat didalam fungsi tersebut
3. Aktivitas Pengendalian
- Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang di buat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam mencapai tujuan entitas. Aktivitas yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan kedalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut :
- a. Pengendalian Pengolahan Informasi  
Banyak perusahaan sekarang menggunakan komputer untuk mengolah informasi umumnya dan terutama informasi akuntansinya. Pengendalian pengolahan informasi dibagi menjadi dua : pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
  - b. Pengendalian Umum  
Unsur pengendalian umum ini meliputi : organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan system dan pengoprasian fasilitas pengolahan data.
  - c. Pengendalian fisik  
Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files, dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendalian.
  - d. Pengendalian aplikasi  
Pengendalian aplikasi terhadap pengolahan transaksi tertentu dikelompokkan menjadi: (1) prosedur otorisasi yang memadai, (2) perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup, (3) pengecekan secara independen.
  - e. Prosedur otorisasi yang memadai  
Di dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, di dalam organisasi harus dibuat system yang mengatur wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
  - f. Perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup seperti telah disebutkan diatas, setiap transaksi di dalam organisasi

hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, di dalam organisasi harus dibuat prosedur otorisasi atas terlaksanannya setiap transaksi.

- g. Pengecekan secara independent  
Pengecekan secara independent mencakup verifikasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan sebelumnya oleh individu atau departemen lain atau penilaian semestinya terhadap jumlah yang dicatat.
  - h. Pemisahan fungsi yang memadai  
Pembagian tugas di dalam organisasi dalam perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :
    1. Pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi akuntansi
    2. Pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan aktiva yang bersangkutan
    3. Pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi akuntansi
  - i. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan  
Cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan adalah dengan menyediakan perlindungan secara fisik. Penggunaan fisik juga diperlukan untuk catatan dari dokumen. Pembuatan catatan yang rusak akan memerlukan biaya yang besar dan waktu yang banyak.
  - j. *Review* kinerja  
*Review* kinerja mencakup *review* dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas :
    1. Laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku pembantu
    2. Kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, perkiraan atas jumlah tahun yang lalu.
    3. Hubungan antara serangkaian data, seperti data keuangan dengan data non keuangan.
4. Sistem Informasi dan Komunikasi Akuntansi  
Sistem informasi akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak luar, dan mentransfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi dalam manajemen dilaporan keuangan.
5. Pemantauan  
Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat

## 2.4 Pemahaman dan Evaluasi atas Struktur Pengendalian Intern

Menurut Sukrisno Agoes (2012:104) terdapat tiga cara yang bisa digunakan Akuntan Publik dalam melakukan pemahaman dan evaluasi atas struktur pengendalian intern, yaitu:

### 1. *Internal Control Questionnaire*

Cara ini banyak digunakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya KAP sudah memiliki satu set ICQ yang standar, yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern diberbagai jenis perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ diminta untuk dijawab Ya (Y), atau Tidak (T), atau Tidak Relevan (TR). Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disusun dengan baik, maka jawaban “Ya” akan menunjukkan ciri internal kontrol yang baik, “Tidak” akan menunjukkan ciri internal kontrol yang lemah, “Tidak Relevan” berarti pertanyaan tersebut tidak relevan untuk perusahaan tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Auditor harus menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan di ICQ kepada staf klien dan kemudian mengisi sendiri jawabannya, jangan sekedar menyerahkan ICQ kepada klien untuk diisi.
- b. Untuk *repeat engagement* (penugasan yang berikutnya) ICQ tersebut harus dimutakhirkan berdasarkan hasil tanya jawab dengan klien.
- c. Adanya kecenderungan bahwa klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian intern sangat baik. Karena itu auditor harus melakukan *compliance test* untuk membuktikan efektivitas dari pengendalian intern klien.

### 2. Bagan Arus (*Flowchart*)

*Flowchart* menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha, misalnya dalam *flowchart* untuk sistem dan prosedur pembelian, hutang usaha dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian (*purchase requisition*), order pembelian (*Purchase Order*) sampai dengan pelunasan hutang yang berasal dari pembelian tersebut. Untuk auditor yang terlatih baik, penggunaan *flowchart* lebih disukai karena auditor bisa lebih cepat melihat kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistem dan prosedur. Periksa apakah semua dokumen sudah diproses sesuai dengan prosedur yang digambarkan dalam *flowchart*.

### 3. *Narrative*

Dalam hal ini auditor menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini bisa digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana.

## 2.5 Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern

Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Menurut Mulyadi (2010:173) terdapat lima keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap struktur pengendalian intern, yaitu:

1. Kesalahan dalam pertimbangan  
Manajemen dan personel lain sering kali salah paham dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.
2. Gangguan  
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.
3. Kolusi  
Tindakan bersama dalam individu untuk tujuan kejahatan tersebut disebut sebagai kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen  
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi Manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. Contohnya adalah Manajer melaporkan jumlah laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapat bonus lebih tinggi dari dirinya.
5. Biaya Lawan Manfaat  
Biaya yang diperlukan untuk diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian internal.

## 2.6 Sifat Pengendalian Intern

Suatu pengendalian intern yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Tuanakotta (2013) dalam bukunya menyatakan bahwa pengendalian intern harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu :

1. Prosedur  
Suatu pengendalian intern harus mempunyai prosedur yang jelas yang harus ditetapkan, selanjutnya prosedur ini akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dilihat dari segi pengendalian, prosedur yang telah ditetapkan tetapi tidak dilaksanakan sehingga tidak mempunyai arti.
2. Pelaksanaan  
Prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya harus dijalankan oleh orang yang mempunyai kompetensi didalam fungsi yang bersangkutan. Kompetensi mencakup keahlian yang dimiliki, ilmu pengetahuan, ketelitian dan adanya wewenang yang diserahkan kepadanya.
3. Pemisahan Tugas  
Pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh orang yang cakap dan terampil saja tidaklah cukup. Dalam pelaksanaan juga diperlukan pemisahan tugas untuk mengurangi kecurangan yang bisa terjadi, dan agar struktur pengendalian intern dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Dalam pelaksanaan pengendalian, terdapat tiga pengendalian intern yang dapat dipercaya, yaitu :

1. Kualitas karyawan sesuai dengan tanggungjawabnya
2. Rencana organisasi yang memberi pemisahan tanggung jawab fungsi secara layak
3. Proses pemberian wewenang, tujuan dan teknik, dan pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas aktiva, hutang, penghasilan dan biaya

## 2.7 Hubungan Pengendalian Intern dengan Pemeriksaan Akuntansi

Dalam melaksanakan tugas lapangannya, seorang auditor harus memegang teguh profesinya berdasarkan standar auditing yang merupakan pedoman utama bagi *auditor* ini terdiri kesepuluh standar auditing. Standar-standar ini meliputi pertimbangan mengenai kualitas laporan, bahan bukti.

Standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2011:150.1 & 150.2) adalah sebagai berikut :

1. Standar Umum
  - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai *auditor*.
  - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh *auditor*.
  - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, audit wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan
  - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus supervisi dengan semestinya.
  - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.
  - c. Bukti audit komponen yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatukan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar pelaporan
  - a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  - b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
  - c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
  - d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan *auditor*, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

Sebelum *auditor* melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan klien, maka *auditor* terlebih dahulu harus memahami masing-masing unsur dari pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan klien tersebut untuk merencanakan audit atas laporan keuangan satuan usaha tersebut. Pemahaman tersebut meliputi pengetahuan mengenai rancangan kebijakan dan prosedur relevan, serta catatan, dan apakah rancangan tersebut telah ditetapkan oleh satuan usaha yang akan diaudit.

Keharusan *auditor* untuk melakukan pemahaman terhadap struktur pengendalian intern dituangkan oleh *Ikatan Akuntan Indonesia* dalam *Standar Pekerjaan Lapangan* (2011:311.1), yaitu : Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

Adapun menurut *Ikatan Akuntan Indonesia* dalam *Standar Pekerjaan Lapangan* (2011:311.1) tujuan dari *auditor* untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern yang ditetapkan oleh perusahaan klien adalah untuk menentukan :

1. Kemungkinan dapat atau tidaknya pemeriksaan akuntan dilaksanakan
2. Salah saji material yang potensial dapat terjadi
3. Risiko deteksi
4. Perancangan pengujian

Jika dari hasil studi dan pengujian efektivitas pengendalian intern, ternyata pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan klien adalah sangat lemah atau tidaknya ada sama sekali, maka *auditor* harus menolak untuk memberikan pendapat terhadap kewajaran dari pada pelaporan keuangan yang diaudit.

Berikut ini akan dikemukakan tipe-tipe dari pendapat *auditor* yang dikemukakan oleh Arens, Elder, Beasley (2010:70), yaitu :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian  
Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan *auditor* menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian  
Dengan pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan dikecualikan.
4. Pendapat tidak wajar  
Dengan pendapat tidak wajar, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat  
Dengan pernyataan tidak memberikan pendapat, auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Jika dari hasil pemahaman dan pengujian terhadap struktur pengendalian intern *auditor* menemukan adanya kelemahan-kelemahan, maka *auditor* bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil-hasil dari penemuannya tersebut kepada pihak manajemen. Berdasarkan informasi tersebut, pihak manajemen diharapkan untuk memperbaiki struktur pengendalian intern yang diterapkan, jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang akan dikeluarkan.

Salah satu cara untuk menilai pengendalian intern adalah dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam struktur pengendalian intern tersebut. Menurut Guys, Alderman, Winters (2002:265) untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang bersifat *material*, maka terdapat empat tahap yang harus dilakukan oleh seorang auditor, yaitu :

1. Mengidentifikasi pengendalian yang sedang berjalan  
*Auditor* terlebih dahulu harus mengetahui setiap pengendalian yang ada
2. Mengidentifikasi pengendalian kunci yang tidak ada  
Daftar pertanyaan pengendalian internal, uraian naratif, bagan arus adalah alat bantu yang berguna untuk mengidentifikasi bidang-bidang dimana tidak terdapat pengendalian kunci yang seharusnya ada dan kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat ditimbulkan.
3. Menentukan setiap kesalahan material yang kemungkinan dapat terjadi  
Hal ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesalahan tertentu atau ketidaklaziman yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak adanya pengendalian intern.

4. Mempertimbangkan kemungkinan adanya pengendalian pengganti  
Pengendalian pengganti adalah pengendalian lain yang di dalam perusahaan kecil adalah campur tangan pemerintah.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern memiliki hubungan yang erat dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh *auditor*. Jika pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan klien dinilai cukup memadai, maka dapat memperkecil biaya yang akan dikeluarkan, waktu dan ruang lingkup pemeriksaan pada suatu perusahaan.